

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi ditandai dengan berlakunya undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan diserahkannya sejumlah kewenangan yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Menurut Rasyid (2005:8) tujuan utama kebijakan otonomi daerah adalah untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga pemerintah pusat berkesempatan untuk mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dalam mengambil manfaat dari padanya.

Penjelasan tersebut mengandung makna bahwa dengan diserahkannya sejumlah kewenangan kepada pemerintah daerah lebih memberikan ruang kepada pemerintah pusat untuk merespon perkembangan global dalam rangka memajukan dan mengembangkan seluruh sektor kehidupan masyarakat. Hal ini berarti, bahwa dengan diserahkannya sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, memberikan ruang dan kesempatan kepada semua daerah otonom untuk membangun, mengurus, dan mengembangkan wilayahnya masing-masing.

Senada dengan pernyataan tersebut di atas, Surbakti (2000:9), mengemukakan bahwa kewenangan otonomi diberikan kepada daerah untuk memelihara dan mengembangkan identitas budaya lokal. Hal ini dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam pulau, bahasa, dan budaya

lokal perlu dipertahankan dan dikembangkan melalui kebijakan otonomi agar kearifan lokal tetap terjaga dan diharapkan mampu menunjang pembangunan nasional.

Implikasi berlakunya otonomi daerah menyebabkan perubahan dalam berbagai aspek pembangunan di Indonesia termasuk aspek desentralisasi pendidikan. Ada beberapa hal yang menyebabkan desentralisasi pendidikan sangat urgen untuk dilaksanakan diantaranya: pembangunan masyarakat demokrasi, pengembangan *social capital*, dan peningkatan daya saing bangsa (Tilaar, 2002:20). Ketiga hal tersebut cukup dijadikan alasan untuk pelaksanaan desentralisasi bidang pendidikan.

Upaya untuk melancarkan dan mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah terutama di bidang pendidikan, dibutuhkan manusia yang berkualitas sebagaimana fungsi pendidikan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Fungsi pendidikan tersebut mengandung harapan yang sangat besar terhadap pembentukan manusia yang berkualitas demi kelancaran pembangunan bangsa Indonesia terutama pada wilayah daerah yang diberikan mandat untuk mengembangkan dan mengintegrasikan budaya lokal ke dalam wilayah pendidikan nasional, sehingga terjadi keseimbangan pengetahuan nasional dan pengetahuan lokal daerah.

Upaya untuk merealisasikan harapan-harapan tersebut, berbagai pembaharuan dalam pendidikan terus diupayakan oleh pemerintah. Pembaharuan tersebut ada yang menyangkut pengambilan keputusan dan kebijakan, Paradigma manajemen, pengelolaan sumber-sumber, paradigma pengembangan kurikulum, pengelolaan keuangan, serta mekanisme evaluasi.

Pembaharuan pendidikan yang menyangkut pengambilan keputusan dan kebijakan misalnya, dengan diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang desentralisasi pemerintahan, salah satu bidang yang ikut di desentralisasikan adalah bidang pendidikan. Pembaharuan dalam sistem pengelolaan pendidikan dapat dilihat dengan adanya konsep *School Based Management* (MBS), yaitu model pengelolaan pendidikan yang lebih memberikan kemandirian masing-masing satuan pendidikan untuk mengelola dan mengurus sekolahnya sesuai dengan kebutuhan dan potensinya dengan dibantu oleh masyarakat setempat. Kebijakan MBS tersebut diharapkan sekolah lebih mandiri melalui pemberian kewenangan (otonom) dan fleksibilitas kepala sekolah dalam mengelolah sumber daya; mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan”.

Pembaharuan dalam pengelolaan sumber-sumber belajar dapat dilihat dengan adanya keterlibatan masyarakat serta pemanfaatan lingkungan sebagai faktor pendukung pembelajaran, serta adanya ruang bagi pendidik untuk menciptakan sumber belajar dengan memanfaatkan potensi lingkungan demi mencapai hasil belajar yang maksimal. Pembaharuan dalam pengembangan kurikulum dapat dilihat dengan diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yaitu kurikulum dengan paradigma baru pengembangannya

yang memberikan kewenangan kepada masing-masing satuan pendidikan untuk menyusun dan mengembangkan materi pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi sekolah.

Hal tersebut dimaksudkan agar kurikulum yang di terapkan di setiap sekolah dapat lebih bermakna, sesuai dengan keadaan sekolah, serta dapat menciptakan penyeimbangan materi ajar antara kepentingan nasional dan kepentingan lokal melalui kurikulum muatan lokal, sedangkan pembaharuan dalam evaluasi dapat dilihat dengan diberlakukannya sistem ujian nasional (UN) yang semula menggunakan evaluasi belajar tahap akhir (EBTA) dan evaluasi belajar tahap akhir nasional (EBTANAS).

Pembaharuan dalam Pendidikan tersebut didasari pertimbangan bahwa sistem pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Hal ini dijabarkan melalui peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan (Bab II, pasal 2).

Standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis satuan pendidikan tertentu, sedangkan Standar kompetensi lulusan (SKL) meliputi standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar

kompetensi lulusan minimal mata pelajaran, yang akan bermuara pada kompetensi dasar (KD). Standar isi (SI) sebagaimana dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2003 memuat kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik. Kerangka dasar kurikulum meliputi; kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan, sedangkan dalam struktur kurikulum memuat tentang pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, yang terdiri dari: mata pelajaran, penguatan, dan muatan lokal.

Kebijakan untuk mengakomodir mata pelajaran muatan lokal dalam standar isi dilandasi oleh kenyataan bahwa Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau serta beraneka ragam kebudayaan. Sekolah tempat program pendidikan dilaksanakan merupakan bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, program pendidikan di sekolah perlu memberikan wawasan yang luas kepada peserta didik tentang kearifan lokal yang ada dilingkungan sekitarnya.

Muatan lokal merupakan program pendidikan yang isi dan media penyampaianya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial serta lingkungan budaya dan kebutuhan daerah yang wajib dipeleajari oleh peserta didik. Secara umum, tujuan penerapan muatan lokal untuk memberikan bekal pengetahuan, ketrampilan dan sikap hidup kepada peserta didik agar memiliki wawasan yang mantap tentang lingkungan dan masyarakat sesuai dengan nilai-

nilai yang berlaku di daerahnya dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan nasional. Secara khusus penerapan muatan lokal bertujuan agar peserta didik:

1. Mengetahui dan menjadi akrab dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budayanya;
2. Memiliki bekal kemampuan dan ketrampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya;
3. Memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai/aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional;
4. Menyadari lingkungan dan masalah-masalah yang ada di masyarakat serta dapat membantu mencari pemecahannya (Depdiknas, 2006).

Mencermati rumusan tujuan penerapan muatan lokal yang notabene menitikberatkan pada keakraban peserta didik dengan lingkungan, budaya serta potensi daerah dimana sekolah diselenggarakan, maka ada beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam implementasi muatan lokal adalah; a). muatan lokal harus disesuaikan dengan keadaan daerah; b). muatan lokal harus berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah; c). muatan lokal harus sejalan dengan kebutuhan daerah atau masyarakat. Namun demikian, upaya untuk mencapai tujuan muatan lokal yang telah dirumuskan di atas tentu tidak semudah membalik telapak tangan, dalam artian bahwa implementasi muatan lokal di lapangan masih terdapat serba-serbi persoalan yang perlu dipecahkan bersama oleh para praktisi pendidikan. Larudi (2008:10) dalam penelitiannya menyatakan bahwa:

kendala yang ditemui dalam proses penerapan kurikulum muatan lokal, diantaranya; keterbatasan pemahaman guru mengenai muatan lokal; kurangnya sumber daya manusia sebagai tim pengembang kurikulum muatan lokal di daerah atau di sekolah; adanya pemahaman bahwa muatan lokal adalah bahasa daerah sehingga yang diajarkan di setiap sekolah



adalah bahasa daerah; kurang di manfaatkannya lingkungan masyarakat sebagai sumber belajar dalam penerapan muatan lokal.

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa penerapan kurikulum muatan lokal di sekolah masih membutuhkan perbaikan terutama pada tahap pengembangan kurikulum muatan lokalnya. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan sosialisasi dan pelatihan agar Kepala Madrasah, Guru-guru, Staf, dan seluruh stakeholder di setiap satuan pendidikan memahami hakikat penerapan dan pengembangan kurikulum muatan lokal.

Senada dengan pendapat di atas Cham dan Tuti (2010:197), mengemukakan kendala utama penerapan kurikulum muatan lokal adalah terbatas dan kurangnya sumber daya manusia di sektor pendidikan dalam mengembangkan kurikulum muatan lokal. Begitu pula Mulyasa (1997) dalam penelitiannya, bahwa kurikulum muatan lokal belum dilaksanakan secara optimal, baik perencanaan maupun pelaksanaannya. Hal ini ditandai dengan belum digunakannya metode yang bervariasi, belum digunakannya secara optimal media dan sumber belajar yang terdapat di masyarakat, serta belum dilakukannya kerja sama dengan masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kurikulum muatan lokal.

Beberapa hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas menunjukkan perlunya terobosan dari pemerintah yang menangani bidang pendidikan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder di setiap satuan pendidikan tentang hakikat penerapan kurikulum muatan lokal dan sistem pengembangannya agar tujuan penerapan kurikulum muatan lokal yang telah dirumuskan dapat tercapai dengan maksimal.

Madrasah Tsanawiyah (MTs) al-Junaidiyah yang berlokasi di kota Watampone kabupaten Bone merupakan pilihan peneliti untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian karena dari pengamatan awal peneliti terdapat sesuatu yang berbeda dengan madrasah bahkan sekolah lain yang ada di Kabupaten Bone, yaitu diterapkannya baca tulis al-Qur'an sebagai muatan lokal, sedangkan madrasah lain pada umumnya menerapkan bahasa daerah dan tarian padduppa sebagai muatan lokal. Hal tersebut didasari pemikiran bahwa keterampilan membaca dan menulis al-Qur'an peserta didik di MTs al-Junaidiyah Watampone dianggap penting karena merupakan tuntutan sosial masyarakat yang masih bersifat religius dan masih memegang nilai-nilai al-Qur'an sebagai dasar hidup. Terbukti pada tahun 2009 melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Bone telah mengeluarkan Perda nomor 11 tentang pemberantasan buta aksara al-Qur'an <http://www.djpp.kemendiknas.go.id/files/ld/2009/bone11-2009>.

MTs al-Junaidiyah yang notabenenya berbasiskan pendidikan Islam secara otomatis mengakomodir pembelajaran al-Qur'an dalam sebaran struktur mata pelajaran dari BSNP yang dimuat dalam mata pelajaran al-Qur'an Hadis dua jam perminggu. Namun demikian, MTs al-junaidiyah Watampone telah mengakomodir baca tulis al-Qur'an sebagai muatan lokal karena disatu sisi materi pelajaran al-Qur'an Hadis dianggap sangat teoritis dan lebih mementingkan pengembangan aspek kognitif peserta didik, sehingga kurang menyentuh aspek keterampilan membaca dan menulis al-Qur'an peserta didik. Di sisi lain proses penerimaan peserta didik di MTs al-Junaidiyah Watampone tidak ada persyaratan yang menekankan agar peserta didik yang diterima harus mampu membaca dan



menulis al-Qur'an. Oleh karena itu, perlu ada terobosan yang dilakukan agar peserta didik yang tidak mampu membaca dan menulis al-Qur'an dengan baik dapat dikembangkan agar lebih baik sesuai dengan teknik fasahah dan hukum tajwid bahkan sampai pada level qari'-qari'ah dan kaligrafi.

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa muatan lokal BTQ yang diselenggarakan di MTs al-Junaidiyah merupakan upaya untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan membaca dan menulis al-Qur'an serta pemahaman terhadap nilai-nilai al-Qur'an pada peserta didik.

Kondisi implementasi kurikulum muatan lokal BTQ di MTs al-Junaidiyah Watampone diformat dalam bentuk klasifikasi yaitu; (a) peserta didik yang sama sekali belum mampu membaca dan menulis al-Qur'an diberikan kesempatan untuk mengikuti pelajaran kelas tingkat satu; (b) peserta didik yang sudah mampu untuk membaca dan menulis al-Qur'an dengan kemampuan sedang (membaca tanpa memperhatikan fashahah dan tajwid) diberikan kesempatan untuk mengikuti kelas tingkat dua; (c) dan bagi peserta didik yang sudah dianggap mahir akan diberikan kesempatan untuk mengikuti kelas tingkat tiga yang dibagi menjadi dua kelas yaitu; (1) kelas khusus Qari dan Qariah (2) kelas khusus menulis indah al-Qur'an (kaligrafi).

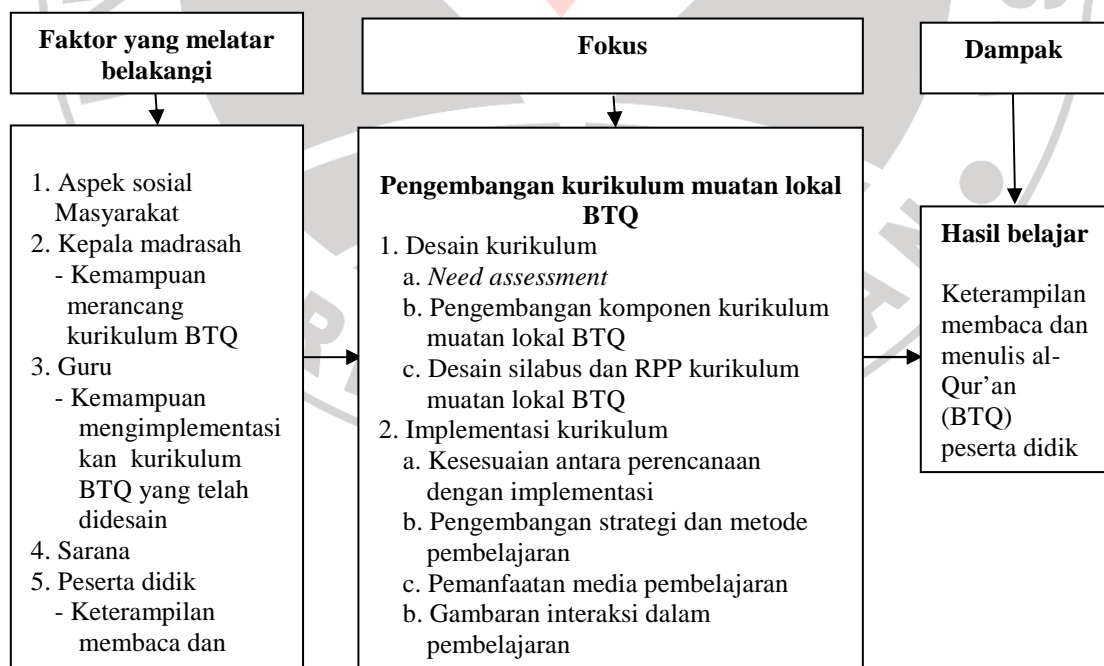
Gambaran kondisi yang telah dipaparkan di atas telah mendorong penulis untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa secara mendalam dan komprehensif proses pengembangan kurikulum muatan lokal BTQ yang telah diimplementasikan di MTs al-Junaidiyah. Oleh karena itu, penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran dalam upaya perbaikan dan

penyempurnaan dalam pengembangan kurikulum muatan lokal BTQ yang diselenggarakan pada MTs al-Junaidiyah Watampone Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

## B. Rumusan Masalah

MTs al-Junaidiyah Watampone telah mengakomodir Baca-Tulis al-Qur'an (BTQ) dalam pelajaran kurikulum muatan lokal yang diajarkan dua jam dalam satu minggu, tentu alokasi waktu dua jam perminggu tidak cukup untuk mendalami al-Qur'an.

Begitu banyak faktor yang melatar belakangi dalam pengembangan kurikulum muatan lokal BTQ di MTs al-Junaidiyah Watampone, hal ini dapat dilihat dalam bagang berikut ini:



Gambar 1.1: Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui bahwa faktor yang melatar belakangi keberhasilan pengembangan kurikulum muatan lokal BTQ di MTs al-Junaidiyah adalah aspek sosial masyarakat yang masih bersifat religious dan masih memegang nilai-nilai al-Qur'an, kemampuan Kepala Madrasah dalam manajemen dan merancang kurikulum muatan lokal BTQ, kemampuan guru dalam mengimplementasikan, sarana dan prasarana, serta kemampuan peserta didik membaca dan menulis al-Qur'an.

Upaya untuk menghindari bias yang luas dan untuk menyesuaikan kemampuan penulis, serta waktu penelitian, maka penelitian ini difokuskan untuk mengetahui, mengkaji, mendeskripsikan, dan menganalisa secara mendalam bagaimana pengembangan kurikulum muatan lokal BTQ pada MTs al-Junaidiyah Watampone Kabupaten Bone?.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian dalam pembahasan ini terdiri atas:

1. Bagaimana desain kurikulum muatan lokal BTQ di MTs al-Junaidiyah Watampone?
  - a. Bagaimana pelaksanaan *need assessment* untuk pengembangan kurikulum muatan lokal BTQ di MTs al-Junaidiyah Watampone?
  - b. Bagaimana pengembangan komponen-komponen kurikulum muatan lokal BTQ di MTs al-Junaidiyah Watampone?
- 1). Bagaimana pengembangan tujuan kurikulum muatan lokal BTQ di MTs al-Junaidiyah Watampone?

- 2). Bagaimana pengembangan materi kurikulum muatan lokal BTQ di MTs al-Juanaidiyah Watampone?
- 3). Bagaimana pengembangan metode pembelajaran kurikulum muatan lokal BTQ di MTs al-Juanaidiyah Watampone?
- 4). Bagaimana sistim evaluasi kurikulum muatan lokal BTQ di MTs al-Juanaidiyah Watampone?
- c. Bagaimana pengembangan silabus dan RPP kurikulum muatan lokal BTQ di MTs al-Juanaidiyah Watampone?
2. Bagaimana implementasi kurikulum muatan lokal BTQ di MTs al-Juanaidiyah Watampone?
  - a. Apakah ada kesesuaian antara perencanaan kurikulum muatan lokal BTQ yang telah dibuat oleh guru dengan implementasi yang dilakukan?
  - b. Bagaimana pengembangan strategi dan metode dalam pembelajaran BTQ di MTs al-Juanaidiyah Watampone?
  - c. Bagaimana pemanfaatan media dalam pembelajaran BTQ di MTs al-Juanaidiyah Watampone?
  - d. Bagaimana interaksi pembelajaran dalam proses pembelajaran BTQ di MTs al-Juanaidiyah Watampone?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mengkaji, mendeskripsikan, dan menganalisa, secara mendalam tentang:

1. Desain kurikulum muatan lokal BTQ di MTs al-Juanaidiyah Watampone.
  - a. Pelaksanaan kegiatan *need assessment* untuk pengembangan kurikulum muatan lokal BTQ di MTs al-Juanaidiyah Watampone.
  - b. Pengembangan komponen-komponen kurikulum muatan lokal BTQ di MTs al-Juanaidiyah Watampone
    - 1). Pengembangan tujuan kurikulum muatan lokal BTQ di MTs al-Juanaidiyah Watampone.
    - 2). Pengembangan materi kurikulum muatan lokal BTQ di MTs al-Juanaidiyah Watampone.
    - 3). Pengembangan metode pembelajaran kurikulum muatan lokal BTQ di MTs al-Juanaidiyah Watampone.
    - 4). Sistem evaluasi kurikulum muatan lokal BTQ di MTs al-Juanaidiyah Watampone.
  - c. Pengembangan silabus dan RPP kurikulum muatan lokal BTQ di MTs al-Juanaidiyah Watampone.
2. Implementasi kurikulum muatan lokal BTQ dalam pembelajaran di MTs al-Juanaidiyah Watampone.
  - a. Kesesuaian antara perencanaan kurikulum muatan lokal BTQ yang telah dibuat oleh guru dengan implementasi yang dilakukan.
  - b. Pengembangan strategi dan metode dalam pembelajaran BTQ di MTs al-Juanaidiyah Watampone.
  - c. Pemanfaatan media dalam pembelajaran BTQ di MTs al-Juanaidiyah Watampone.

- d. Gambaran interaksi pembelajaran dalam proses pembelajaran BTQ di MTs di MTs al-Junaidiyah Watampone.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Signifikansi hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan antara lain sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat, mempertajam dan menambah khasanah teoritik di bidang pengembangan kurikulum muatan lokal, terutama pada tahap pengembangan *need assessment* kurikulum muatan lokal; pengembangan komponen-komponen kurikulum muatan lokal yang terdiri dari pengembangan tujuan pembelajaran BTQ, pengembangan materi pembelajaran BTQ, pengembangan metode pembelajaran BTQ, sistim evaluasi pembelajaran BTQ; dan pengembangan silabus dan RPP kurikulum muatan lokal BTQ. Selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam implementasi kurikulum muatan lokal, khususnya kesesuaian antara perencanaan kurikulum muatan lokal yang telah dibuat oleh guru dengan implementasi yang dilakukan, pengembangan strategi dan metode pembelajaran BTQ, pemanfaatan media, dan gambaran interaksi dalam proses pembelajaran BTQ.



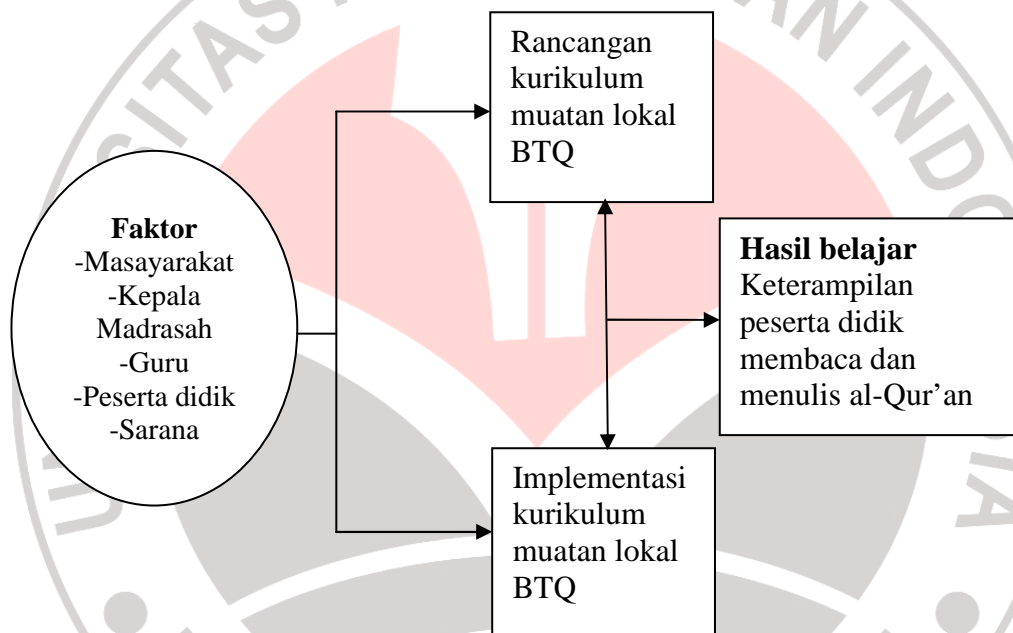
## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam upaya untuk menyempurnakan penyelenggaraan kurikulum muatan lokal BTQ di MTs al-Junaidiyah Watampone Kabupaten Bone.

- a). Bagi Guru muatan lokal BTQ, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penyempurnaan dalam implementasi kurikulum muatan lokal.
- b). Bagi Kepala Madrasah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam kerangka perbaikan penyelenggaraan kurikulum muatan lokal pada MTs al-Junaidiyah Watampone Kabupaten Bone.
- c). Bagi Supervisor, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan supervisi dalam menyempurnakan kurikulum muatan lokal.
- d). Komite sekolah/madrasah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pendidikan khususnya penyelenggaraan kurikulum muatan lokal.
- e). Bagi Kementerian Agama Kabupaten Bone, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka perbaikan dan pengembangan program penyelenggaraan kurikulum muatan lokal di Kabupaten Bone.
- f). Bagi Program Studi Pengembangan Kurikulum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian-penelitian lebih lanjut.

### E. Kerangka Pikir

Kegiatan penelitian memerlukan alur kerja yang jelas agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kekeliruan, kesalah pahaman, dan penyimpangan, maka peneliti perlu menyusun kerangka berpikir sebagai dasar dan panduan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai pada tahap akhir atau pelaporan. Lebih jelasnya dapat dilihat gambar berikut ini:



Gambar 1. 2: Kerangka Pikir

Penelitian ini difokuskan pada proses pengembangan kurikulum muatan lokal BTQ di MTs al-Junaidiyah. Diawali dengan menelaah dan menganalisa faktor yang melatar belakangi pengembangan kurikulum BTQ dan membuat desain kurikulum dengan melakukan *need assessment* (analisis kebutuhan) terhadap lingkungan masyarakat serta menganalisa kebutuhan peserta didik. Selanjutnya merumuskan komponen kurikulum mulai dari tujuan kurikulum, materi, metode, dan sistem evaluasi dalam pembelajaran yang dijabarkan dalam

rumusan silabus dan RPP dengan mempertimbangkan kesesuaian antar komponen-komponen kurikulum muatan lokal BTQ.

Keberadaan kurikulum muatan lokal BTQ yang telah didesain tentu membutuhkan implementasi dalam pembelajaran, hal ini dapat dilakukan oleh para guru dengan menyusun RPP sebagai pedoman dalam pembelajaran. Kemampuan guru untuk membuat dan menyusun RPP sangat membantu kelancaran dalam pelaksanaan pembelajaran dan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembelajaran di kelas. Lebih lanjut dalam pembelajaran, guru harus memperhatikan kesesuaian antara desain yang telah dibuat dengan pelaksanaan di kelas, baik pengembangan strategi dan metode pembelajaran, pemanfaatan media, dan bentuk interaksi yang dikembangkan dalam proses pembelajaran.